Relevansi dan Implementasi Prinsip Ijtihad Imam Syafi'i dalam Menjawab Problematika pada Transaksi Digital

Siti Salwa¹, Muhajirin², N Oneng Nurul Bariyah³

Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, Indonesia
Email: Siti_salwa24@mhs.uinjkt.ac.id¹, muhajirin@uinjkt.ac.id²,
oneng.nurul@uinjkt.ac.id³

Abstrak

Perkembangan teknologi digital telah menghasilkan berbagai bentuk transaksi baru yang belum pernah ada sebelumnya dalam hukum konvensional, seperti *e-commerce*, dompet digital, dan layanan *fintech* syariah. Dalam hal ini, semua transaksi baru harus menyesuaikan dengan prinsip-prinsip Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi pemikiran Imam Syafi'i dengan implementasi transaksi digital. Penelitian ini mengkaji teknik ijtihad Imam Syafi'i khususnya qiyas, istinbath, dan sikap kehati-hatian. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis penelitian kepustakaan (*library research*). Selain itu penelitian ini juga menganalisis bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan dalam fatwa-fatwa modern yang berkaitan dengan transaksi digital. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode ijtihad Imam Syafi'i relevan dan dapat digunakan secara kontekstual dengan pendekatan analogis dan prinsip *maqashid syariah* yang tersirat dalam kerangka *ushul fikih*nya sehingga menjadi acuan praktik transaksi digital. Penelitian ini menegaskan bahwa ijtihad Imam Syafi'i menjadi pilar penting dalam menjaga keautentikan hukum Islam di tengah perkembangan zaman, termasuk dalam konteks digitalisasi ekonomi. Implikasi penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan metodologi hukum Islam kontemporer dan secara praktis dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan bagi lembaga fatwa dalam mengeluarkan regulasi transaksi digital syariah.

Kata Kunci : Ijtihad, Imam Syafi'i, transaksi digital, qiyas, fikih kontemporer

Abstract

The development of digital technology has given rise to various new forms of transactions that have never existed before in conventional law, such as e-commerce, digital wallets, and sharia fintech services. In this case, all new transactions must comply with Islamic principles. This study aims to analyze the relevance of Imam Syafi'i's thinking to the implementation of digital transactions. This study examines Imam Syafi'i's ijtihad techniques, particularly qiyas, istinbath, and the principle of caution. The research employs a qualitative approach based on library research. Additionally, the study analyzes how these principles are applied in modern fatwas related to digital transactions. The results of this study indicate that Imam Syafi'i's ijtihad methods are relevant and can be applied contextually using an analogical approach and the principles of maqashid syariah implied in his ushul fikih framework, thereby serving as a reference for digital transaction practices. This research emphasizes that Imam Syafi'i's ijtihad is a crucial pillar in maintaining the authenticity of Islamic law amid societal developments, including in the context of economic digitalization. The implications of this research provide a theoretical contribution to the development of contemporary Islamic law methodologies and can practically be used as a basis for decision-making for fatwa institutions in issuing sharia digital transaction regulations.

Keywords : Ijtihad, Imam Shafi'i, digital transactions, qiyas, contemporary fiqh

PENDAHULUAN

Era digital telah membawa banyak perubahan positif yang dapat membantu dan di manfaatkan dengan baik saat ini, akan tetapi juga membawa pengaruh negatif yang menimbulkan tantangan baru bagi kehidupan manusia di era digitalisasi ini (Naibaho et al., 2022; Setiawan, 2017b, 2017a; Susmayati et al., 2023; Yunita et al., 2023). Adapun rintangan yang dapat mempengaruhi diantaranya seperti teknologi informasi, pertahanan, keamanan, ekonomi, dan sosial budaya (Kurniawan & Nisa, 2024). Di era revolusi industri 4.0, digitalisasi menjadi kebutuhan bagi lembaga keuangan syariah untuk bertahan dan bersaing. Kecerdasan buatan (AI), *e-commerce*, data raksasa, teknologi keuangan (*financial technology*), dan penggunaan robot adalah beberapa perkembangan yang sangat canggih dan berdampak besar pada kehidupan manusia yang dikenal sebagai revolusi industri 4.0 (Abdullah, 2019).

Berbagai bentuk transaksi baru dalam era digital dihasilkan oleh kemajuan pesat dalam teknologi informasi. Untuk menangani era digitalisasi ini, hukum Islam harus menyesuaikan dengan mempertahankan prinsip dasar syariah. Metode ijtihad dan dinamika pemikiran para mazhab klasik seperti Imam Asy-Syafi'i menjadi sangat penting untuk dikaji ulang dalam konteks ini. Banyak bentuk transaksi yang baru muncul di era digital saat ini, seperti *e-commerce*, *fintech*, pembayaran digital (*electronic payment*), hingga kontrak cerdas (*smart contracts*). Beberapa bentuk transaksi ini tidak ditemukan dalam literatur fiqih klasik. Oleh karena itu, prinsip-prinsip metodologis yang terkandung dalam modifikasi qaul Imam Asy-Syafi'i dapat menjadi sumber pengambilan keputusan yang signifikan untuk menanggapi masalah-masalah yang muncul di zaman sekarang. Metode ini menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki potensi untuk terus berkembang tanpa menghilangkan keotentikannya.

Umat Islam menghadapi berbagai tantangan baru seiring berjalannya waktu, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Pemikiran hukum Islam yang fleksibel namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat diperlukan dalam beberapa fenomena yang terjadi seperti transaksi digitalisasi, inovasi produk keuangan syariah, dan diversifikasi akad modern. Dalam konteks ini, pendekatan Imam Asy-Syafi'i menjadi sangat penting untuk dipelajari kembali, terutama karena konsep qiyas dan perbedaan antara qaul qadim dan qaul jadid dapat digunakan untuk memberikan solusi hukum terhadap masalah ekonomi dan keuangan yang sedang dihadapi pada era ini.

Imam Syafi'i adalah salah satu ulama yang telah berijtihad untuk mempelajari hukum dan menulis karya fiqih. Hasil ijtihadnya dikenal sebagai qaul qadim ketika berada di Irak dan qaul jadid ketika berada di Mesir. Salah satu alasan adanya qaul qadim dan qaul jadid adalah bahwasannya masyarakat dengan berbagai corak yang ada menghendaki adanya perubahan tatanan sosial. Selain itu, sistem nilai dan hukum selalu berubah seiring dengan setiap perubahan sosial. Muncul sebagai refleksi dari situasi sosial yang mendorong pada perubahan hukum. Dengan demikian, keadaan sosial memengaruhi pemikiran seseorang sehingga dapat dikatakan bahwa pendapat atau hasil pemikiran seseorang merupakan refleksi dari masa lalu. Dalam profil Imam Syafi'i mengunjungi

banyak tempat, mulai dari rumahnya di Palestina hingga Mekkah, Madinah, Yaman, Irak, dan Mesir. Pada akhirnya, jalan pemikiran dan penerapan produk hukum yang dibuat dipengaruhi oleh perjalanan ilmiah ini (Herdiansyah, Umar, & Ramlah, 2023).

Ijtihad merupakan instrumen penting dalam perkembangan hukum Islam, yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan dan kontekstual sepanjang zaman. Di antara tokoh sentral dalam sejarah pembentukan dan kodifikasi hukum Islam adalah Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i tidak hanya meletakkan fondasi ushul fiqh sebagai metodologi baku dalam menggali hukum, tetapi juga menampilkan dinamika pemikiran hukum yang unik melalui fase evolutif ijtihadnya, yakni perpindahan dari *Qaul Qadim* (pendapat lama) menuju *Qaul Jadid* (pendapat baru). *Qaul Qadim* adalah pendapat imam Asy-Syafi'i pada waktu tinggal di Baqdad, Irak. Sedangkan *Qaul Jadid* adalah pendapat Asy-Syafi'i setelah ia hijrah dan berdomisili di Mesir.

Seiring dengan perkembangan zaman, umat Islam dihadapkan pada berbagai tantangan baru, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah. Fenomena seperti digitalisasi transaksi, inovasi produk keuangan syariah, serta diversifikasi akad-akad kontemporer menuntut adanya pemikiran hukum Islam yang adaptif namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar syariat. Dalam hal ini, pendekatan Imam Asy-Syafi'i menjadi sangat relevan untuk dikaji ulang, terutama dalam hal bagaimana konsep qiyas dan perbedaan antara *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* dapat memberikan solusi hukum terhadap persoalan-persoalan ekonomi dan keuangan masa kini.

Studi tentang aplikasi metodologi hukum Islam klasik terhadap fenomena kontemporer telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Kamali (2020) menganalisis aplikasi maqasid syariah dalam fintech, namun belum secara spesifik mengeksplorasi metodologi Imam Syafi'i. Al-Suwailem (2022) meneliti penggunaan qiyas dalam cryptocurrency, tetapi fokus pada mazhab Hanbali. Zulkifli et al. (2023) mengkaji fatwa DSN-MUI tentang transaksi digital, namun tidak mengeksplorasi basis metodologis yang mendasarinya.

Hassan dan Ahmed (2021) melakukan studi komparatif metodologi ijtihad klasik dalam konteks keuangan modern, tetapi tidak secara khusus memfokuskan pada kontribusi Imam Syafi'i. Penelitian Bakar dan Rosly (2023) tentang "Islamic Finance in Digital Age" memberikan framework praktis tetapi kurang menggali aspek epistemologis. Sementara itu, Abdullah (2022) menganalisis evolusi fatwa fintech di Malaysia dengan pendekatan masalah, namun belum mengintegrasikan secara komprehensif metodologi syafi'iyah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada eksplorasi mendalam metodologi ijtihad Imam Syafi'i secara spesifik dalam konteks transaksi digital, yang belum dilakukan secara komprehensif dalam literatur sebelumnya. Penelitian ini mengintegrasikan konsep qaul qadim dan qaul jadid sebagai paradigma adaptasi hukum yang relevan dengan dinamika teknologi finansial. Analisis komparatif penerapan prinsip kehati-hatian (ihtiyath) Imam Syafi'i dengan praktik risk management dalam fintech modern menjadi kontribusi distintif. Selain itu, penelitian ini mengembangkan framework epistemologis yang menghubungkan metodologi klasik dengan kebutuhan regulasi kontemporer.

Urgensi penelitian ini didorong oleh beberapa faktor kritis: Pertama, kebutuhan mendesak akan panduan hukum yang otoritatif dan praktis bagi 1.8 miliar Muslim global dalam menghadapi revolusi digital. Kedua, potensi kerugian ekonomi triliunan dollar akibat hesitasi adopsi teknologi finansial di negara-negara Muslim. Ketiga, risiko marginalisasi ekonomi syariah dalam era digital jika tidak segera mengembangkan framework adaptif. Keempat, tantangan legitimasi fatwa-fatwa kontemporer yang memerlukan basis metodologis yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kelima, kebutuhan harmonisasi interpretasi hukum Islam global untuk menciptakan ekosistem ekonomi syariah yang koheren di era digital.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mempelajari bagaimana perubahan dalam ijtihad Imam Asy-Syafi'i berpengaruh dalam menanggapi masalah hukum transaksi digital. Selain itu, diharapkan bahwa pendekatan ijtihad yang kontekstual namun berakar pada tradisi keilmuan Islam yang otoritatif akan ditemukan dengan menganalisis kerangka epistemologis perubahan pendapat Imam Asy-Syafi'i serta prinsip-prinsip yang melandasinya. Penelitian ini tidak hanya akan memperkaya pemikiran hukum Islam klasik, tetapi juga akan membantu menghubungkan warisan intelektual ulama terdahulu dengan kebutuhan hukum Islam modern, khususnya dalam bidang ekonomi dan keuangan syariah yang terus berkembang.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif sebagai metode dari telaah literatur fiqh klasik dan relevansi dalam transaksi digital berdasarkan ijtihad Imam Asy-Syafi'i. Penelitian ini adalah jenis penelitian kepustakaan yang melihat sumber-sumber dari literatur, buku, dan sumber lain yang relevan, dengan dasar ijtihad Imam Syafi'i, yang dikenal dengan qiyas, qaul qadim dan qaul jadid. Sumber data penelitian ini dikategorikan ke dalam penelitian perpustakaan (Library Research). Oleh karena itu, dapat dipastikan bahwa sumber data yang dibutuhkan untuk penelitian ini adalah dokumen, yaitu informasi yang diperoleh dari penelusuran literatur di perpustakaan, baik primer maupun sekunder (Abdussamad, 2021). Penelitian ini mengumpulkan literatur yang relevan dari database, jurnal, buku, dan penelitian. Kemudian, mereka melakukan peninjauan dan analisis literatur yang relevan untuk memahami pendekatan, hasil, dan kesimpulan penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Biografi Imam Syafi'i

Imam Syafi'i dilahirkan di Gaza pada bulan Rajab tahun 150 H (767 M), dan Imam Hanafi wafat pada tahun itu juga di Mesir. Nama lengkap Imam Syafi'i adalah Abu Abdullah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Abd Yazid bin Hasyim bin Abd al-Muthalib bin Abd al-Manaf ibn Qushay al-Quraysi al-Muthalib. Nasab Nabi Muhammad SAW pada Abd Manaf cocok dengan nasab Imam al-Syafi'i. Ayahnya bernama Idris bin al-Abbas, dan dia berasal dari Thalabah, tetapi berasal dari Arab Quraisy. Imam Syafi'i ibn Fathimah binti Abdullah ibn Hasan ibn Husen ibn Ali ibn

Abi Thalib, sementara ibunya bernama Fatimah binti Abdullah adalah keturunan Uzun. Oleh karena itu, ibu Imam Syafi'i adalah cucu dari Sayyidina Ali ibn Abi Thalib, menantu dan khalifah keempat yang terkenal dari Nabi Muhammad SAW. Dalam sejarah, Said ibn Yazid, kakek Imam Syafi'i yang kelima, adalah salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW (Rozi, 2021).

Imam al-Syafi'i telah belajar Al-Quran sejak kecil dan berhasil menghafalnya pada usia tujuh tahun. Pada masa itu, Ismail bin Qhithantun, seorang syaikh di Mekah, adalah gurunya. Dia kemudian menghafal Al-Quran dan belajar hadis dari para ulama. Setelah meninggalkan Mekah, Imam al-Syafi'i pergi ke Madinah untuk belajar dari Imam Malik ibn Anas, seorang ulama terkenal dari Fuqaha pada saat itu. Pada usia dua puluh tahun, Imam al-Syafi'i terus belajar dengan Imam Malik sampai gurunya meninggal pada tahun 179 H/796 M. Pada masa wafatnya, Imam al-Syafi'i menjadi seorang fuqaha yang terkenal di Hijaz dan di tempat lain (Kamil, Muhajirin, & Malli, 2023).

Konsep Dasar Ijtihad dan Istihsan

Menurut Imam Asy-Syafi'i, ijtihad adalah upaya seorang mujtahid untuk menggali hukum syar'i dari dalil-dalil zanni (tidak pasti) dengan metode yang sistematis dan terukur. Istilah ini berasal dari kata "jahada", yang berarti "bersungguh-sungguh" atau "mencurahkan segala kemampuan". Ranah ijtihad berlaku untuk kasus yang ketentuan hukumnya tidak ditunjukkan secara langsung oleh al-Qur'an atau hadits. Oleh karena itu, ranah ijtihad berlaku untuk kasus yang diperoleh dari dalil dhanni, yang membutuhkan peran nalar untuk menentukan maksud hukum yang terkandung di dalamnya (Ubaidillah, 2021).

Berbeda dengan konseptualisasi Kamali (2020) yang menekankan maqasid sebagai basis ijtihad kontemporer, dan Hassan & Ahmed (2021) yang mengutamakan pendekatan masalah, Imam Asy-Syafi'i menetapkan framework yang lebih terstruktur dan hierarkis. Menurut Imam Asy-Syafi'i, ijtihad adalah upaya seorang mujtahid untuk menggali hukum syar'i dari dalil-dalil zanni (tidak pasti) dengan metode yang sistematis dan terukur. Istilah ini berasal dari kata "jahada", yang berarti "bersungguh-sungguh" atau "mencurahkan segala kemampuan". Ranah ijtihad berlaku untuk kasus yang ketentuan hukumnya tidak ditunjukkan secara langsung oleh al-Qur'an atau hadits. Oleh karena itu, ranah ijtihad berlaku untuk kasus yang diperoleh dari dalil dhanni, yang membutuhkan peran nalar untuk menentukan maksud hukum yang terkandung di dalamnya (Ubaidillah, 2021).

Imam Syafi'i menetapkan suatu hukum dengan berlandaskan pada hukum asal yaitu al-Qur'an dan Sunnah, apabila tidak ditemukan di dalam al-Qur'an dan Sunnah maka metode selanjutnya ijma' (consensus ulama'), dan qiyas (analogi) akan dilakukan terhadap keduanya (Muh. Aqsho Che Athoriq. R, 2023). Di luar sumber-sumber ini, Imam Asy-Syafi'i sangat berhati-hati terhadap penggunaan istihsan, masalah mursalah, dan metode-metode ijtihad lain yang dianggapnya rawan penyimpangan dari prinsip nash.

Istilah "istihsan" mengacu pada proses menggali hukum syariat dari akarnya dengan cara tertentu. Menurut Imam Asy-Syafi'i, istihsan adalah proses mendapatkan

hukum dari sumber-sumber syariat dengan menggunakan metode ushul fiqh yang ketat. Ini merupakan bagian dari ijtihad, yang berarti aplikasinya dalam menetapkan hukum. Selain bersifat deduktif (dari nash ke hukum), proses ini melibatkan qiyas, penalaran analogis. Pada masa itu terdapat dua kekuatan besar dalam pemikiran Imam Asy-Syafi'i yaitu Ahl al-Hadith yang sangat menekankan penggunaan hadis secara literal, dan Ahl al-Ra'yi yang mengutamakan logika dan analogi (qiyas) dalam berfatwa. Imam Syafi'i berusaha mengambil jalan tengah ketika melihat perbedaan itu. Ia mengembangkan metode istinbat yang menggabungkan kekuatan dalil naqli (teks wahyu) dan aqli (akal), tetapi dengan prinsip dan aturan yang ketat agar tidak menyimpang dari ajaran Islam yang sebenarnya (Suryantoro, 2025).

Menurut Imam Syafi'i, metode istinbat mengutamakan AlQur'an sebagai sumber hukum tertinggi. Sunnah Nabi yang shahih atau hadist lalu diikuti ijma' (kesepakatan ulama), dan qiyas (analogi hukum berdasarkan nash). Imam Syafi'i sangat ketat dalam menerima hadis dan menentang penggunaan istihsan (penilaian kebaikan pribadi) dan masalah mursalah (pertimbangan kemaslahatan yang tidak didukung oleh nash) sebagai dasar hukum karena dianggap terlalu subjektif dan mungkin menyesatkan (Anwar, bawazir, Sakina, & all, 2023).

Pendekatan Imam Syafi'i berbeda dengan pendekatan mazhab Hanafi, yang lebih fleksibel dan rasional dalam menetapkan hukum. Mazhab Hanafi menggunakan istihsan dan mempertimbangkan adat (urf) saat menetapkan hukum. Sementara itu, mazhab Maliki sangat mengandalkan praktik masyarakat Madinah sebagai sumber hukum, yang menurut Imam Syafi'i hanya dapat digunakan sebagai dasar hukum kecuali didukung oleh nash. Mazhab Hanbali, di sisi lain, sangat konservatif dan literal, bahkan lebih ketat. Metode ini digunakan Imam Syafi'i untuk mencapai tujuan menciptakan keseimbangan antara teks dan akal, serta tradisi dan ijtihad. Imam Syafi'i berhasil membuat sistem hukum yang logis, terorganisir, dan tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar Islam. Al-Risalah karya besarnya berubah menjadi rujukan utama dalam ilmu ushul fiqh dan membantu ulama kemudian standarisasi metode istinbat.

Faktor-Faktor Perubahan Pendapat Imam Asy-Syafi'i Dari *Qaul Qadim* Ke *Qaul Jadid*

Imam Syafi'i mencetuskan dua hukum yakni qaul qadim dan qaul jadid. Dalam ijtihadnya pendapat Imam Syafi'i yang dibahas dan diputuskan selama ia berada di Irak (195-199 H) disebut qaul qadim, sedangkan hasil ijtihad Imam Syafi'i yang dipelajari dan diputuskan selama ia bermukim di Mesir (199-204 H) disebut qaul jadid. Buku-buku al-Risalah al-Qadimah dan al-Hujjah, juga dikenal sebagai al-Kitab al-Qadim merupakan sebagian besar pendapat Imam Syafi'i yang ditulis. Hasan ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad adalah salah satu dari banyak murid dan sahabat Imam Syafi'i yang berada di Irak yang meriwayatkan qaul qadim yang tertuang dalam kedua kitab tersebut dan fatwa-fatwanya. Namun, beberapa kitab Imam Syafi'i, seperti al-Risalah al-Jadidah, al-Umm, al-Amali, al-Imla', dan lain-lain, mencatat qaul jadid yang dibuat ketika Imam Syafi'i tinggal di Mesir dan sekitarnya (Yaqin, 2016).

(Fawwaz, 2024) Imam Asy-Syafi'i (767M hingga 820 M) merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah hukum Islam yang terkenal dengan metodologi ijtihadnya. Dalam proses pemikirannya, ada dua fase penting: Qaul Qadim (pendapat lama) dan Qaul Jadid (pendapat baru). Banyak hal yang memengaruhi pergeseran dari Qaul Qadim ke Qaul Jadid ini, termasuk unsur-unsur ilmu, sosial, dan budaya. Menurut arti terminologis, "qaul" berarti perkataan, pendapat, atau pandangan, dan "qadim" berarti "terdahulu". Oleh karena itu, pandangan fikih Imam Syafi'i yang terdahulu disebut "qaul qadim".

Pada tahun 195 M, Imam Syafi'i tinggal di Baghdad, Irak. Sheikh Muslim bin Kholid, seorang ulama dan ahli hadis dari Mekah, memberi izin kepada Imam Syafi'i untuk menulis qaul qadim untuk pertama kalinya. Imam Malik, seorang ulama dan ahli hadis dari Madinah, keduanya menjadi guru Imam Syafi'i, untuk menyatakan bahwa Imam Syafi'i pada saat itu memiliki otoritas untuk membuat ijtihad atau mengeluarkan fatwa. Qaul Qadim adalah kumpulan fatwa di mana kata "qaul" berarti "jama", yang berarti tidak hanya satu atau dua fatwa, tetapi para ulama tetap menyebutnya "qaul" saja dalam menerapkannya. Ketika Imam Syafi'i berada di Baghdad, Irak, dari tahun 195H hingga 199H, dia menulis Beberapa kitab diantaranya al-Risālah al-Qadimah dan al-Hujjah, yang juga dikenal sebagai al-Kitab al-Qadim, dan menjadi pelopor dalam menghasilkan produk hukum untuk suatu kasus tertentu. Istilah qaul qadim terdapat dalam ijtihad Imam Syafi'i karena fakta bahwa dia menjadi pelopor dalam menghasilkan produk hukum (Yaqin, 2016).

Ketika Imam Syafi'i berada di Mesir, Imam Syafi'i mencoba merevisi beberapa fatwanya yang pada saat itu ditulis di Bagdad. Dengan demikian, beberapa kitab yang ditetapkan, dan ditinjau ulang dengan keadaan di Mesir. Berawal dari fakta yang dialami, istilah "qaul qadim" dan "qaul jadid" muncul, yang masing-masing merujuk pada pendapat yang diputuskan di Bagdad dan Mesir. Setelah memutuskan untuk pergi ke Mesir, Imam Syafi'i berusaha mendapatkan banyak informasi tentang keadaan dan kondisi Mesir. Utamanya beberapa masalah yang terkait langsung dengan teologi yang berkembang di Mesir pada saat itu. Al-Rabi, seorang ulama Mesir, menyatakan bahwa Mesir telah diwarnai oleh dua corak aliran fiqh yang sangat berbeda, dan dia membicarakannya dengan Imam Syafi'i. Pertama, pola yang selalu mengikuti aliran Maliki dan kedua, pola yang setia pada aliran Hanafi (Ahyar, 2015).

Perpindahan Imam Syafi'i dari Irak ke Mesir membuat Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan masyarakat, adat istiadat, dan kebutuhan hukum yang berbeda ketika dia pindah dari Irak ke Mesir. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan penggunaannya dalam ra'yu di Mesir, masyarakat Irak sangat pluralistik, dengan tradisi yang lebih dekat dengan hadis dan praktik ahlul hadis, serta kebutuhan hukum yang berbeda, terutama dalam hal muamalah. Imam Asy-Syafi'i didorong oleh keadaan ini untuk mengubah pendekatannya agar lebih kontekstual, tetap dalam kerangka metodologis yang ketat.

Selain itu, pergeseran dari qaul qadim ke qaul jadid menunjukkan kembali proses ijtihad yang dilakukan Imam Asy-Syafi'i seiring dengan kematangan pemikirannya. Imam Asy-Syafi'i kembali menyusun metodologi hukum yang lengkap di fase awal (Qaul Qadim). Setelah tiba di Mesir, Imam Syafi'i mulai merevisi pendapat-pendapat

sebelumnya dan membuat kerangka metodologinya lebih ketat, sistematis, dan logis. Di Mesir, Imam Asy-Syafi'i bertemu dengan para ahli hadis yang lebih dekat, seperti murid-murid Imam Malik dan para ahli hadis lainnya berbeda dengan di Irak, Imam Syafi'i banyak berinteraksi dengan ulama mazhab Hanafi dan memiliki pengaruh ra'yu yang kuat. Metode Imam Asy-Syafi'i untuk menyeimbangkan nash dan rasionalitas sangat dipengaruhi oleh interaksi ini.

Imam Asy-Syafi'i lebih selektif dalam menerima hadis dalam qaul jadid dan lebih teliti dalam memverifikasi sanad dan matannya. Imam Asy-Syafi'i mengubah pendapatnya karena dia menemukan riwayat hadis yang lebih sahih di Mesir dibandingkan dengan yang dia temukan sebelumnya di Irak, menunjukkan komitmennya terhadap dalil yang lebih kuat dan asli. Dalam qaul jadid, terdapat konsistensi yang lebih besar terhadap prinsip-prinsip ushul fiqh yang dibangun oleh Imam Asy-Syafi'i misalnya, Imam Asy-Syafi'i menerima beberapa bentuk istihsan dan maslahat mursalah secara terbatas, akan tetapi dalam qaul qadid Imam Asy-Syafi'i menolak istihsan karena dianggap membuka peluang untuk subjektivitas yang tidak dapat diukur.

Imam Asy-Syafi'i mulai menyusun ulang ajarannya dalam bentuk yang lebih tertulis dan sistematis pada masa tinggalnya di Mesir, seperti dalam karyanya Al-Umm, hal ini membuat Imam Asy-Syafi'i untuk mengevaluasi secara menyeluruh pendapat-pendapat sebelumnya dan membakukan pendapat yang dianggap lebih tepat dan benar berdasarkan perkembangan keilmuan yang dipelajari. Perubahan dari qaul qadim ke qaul jadid mencerminkan perjalanan epistemologis dan kontekstualisasi hukum Imam Asy-Syafi'i, bukan hanya perbedaan geografis antara Irak dan Mesir. Akan tetapi terdapat beberapa factor yang dapat mempengaruhi diantaranya, faktor sosial, politik, budaya, geografis, dan ilmu pengetahuan (Fawwaz, 2024).

Dinamika Pengembangan Metode Qiyas Dalam Kerangka Ijtihad Imam Asy-Syafi'i

Ijtihad secara bahasa berarti bersungguh-sungguh dalam menggunakan fisik dan pikiran secara optimal. Menurut al-Ghazali, istilah "ijtihad" biasanya tidak digunakan kecuali untuk mengandung tantangan karena melakukan hal-hal kecil seperti mengangkat sebiji sawi tidak dianggap sebagai ijtihad (Al-Ghazali, 2009). Sebagaimana digambarkan (Zahrah, 1958) ijtihad ini terbagi menjadi dua bagian pertama adalah ijtihad yang bertujuan untuk membentuk atau mengistimbat hukum dari dalilnya, kedua adalah ijtihad yang bertujuan untuk menerapkan dalam suatu hal yang akan selalu ada sepanjang hidup umat islam, karena ijtihad dalam bentuk ini bertujuan untuk menerapkan hukum islam, termasuk hasil ijtihad ulama terdahulu.

Ijtihad merupakan salah satu cara untuk menemukan hukum syara' dari sumbernya, mujtahid harus mengerahkan semua kemampuannya yang terkandung pada suatu dalil umum atau khusus, baik yang tersurat (bayani) maupun yang tersirat (ta'lili dan istislahi), untuk kemudian diterapkan pada berbagai kasus hukum. Jika mujtahid menghadapi kasus baru, dia bisa melakukan dua hal: pertama, menerapkan hukum yang disimpulkan dari dalil umum dan khusus untuk kasus baru, atau kedua, mengembalikan kasus baru ke hukum yang ditunjukkan oleh dalil tersebut (Jamal, 2024).

Dalam qiyas, qiyas merupakan analogi yang dianggap sebagai dasar dari semua argumen hukum, dan memberikan penjelasan yang paling lengkap dari semua topik ushul fiqh, atau paling tidak sepertiga dari keseluruhan pengumpulannya. Analoginya, setiap kasus baru dianggap sebagai kasus yang tidak dibicarakan secara langsung oleh teks. Pada titik tertentu, mujtahid bahkan mengubah aturan teks yang jelas untuk mengacu pada kasus baru. Pada intinya qiyas tetap menjadikan teks sebagai rujukan dalam menjawab dan menyelesaikan kasus baru (Fitriyah, Purwanti, & Nursafitri, 2023).

Qiyas merupakan upaya mujtahid untuk mengembalikan berbagai kasus baru atau menerapkan hukum yang telah disimpulkan dari suatu dalil terhadap kasus baru, karena terdapat kesamaan makna atau ‘*illat* pada keduanya (*qiyas ta’lil*), ke makna (*qiyas ma’na*), yang ditunjukkan dengan jelas oleh dalil khusus (*al-mansush*), atau ke makna yang disepakati (*al-muttafaq*), dengan menggunakan dalil umum melalui *istidlal*, *istislah*, dan *istihsan*. Ijtihad dan qiyas digunakan untuk menemukan makna atau ‘*illat* yang akan diterapkan pada kasus baru atau menghasilkan kesimpulan hukum baru berdasarkan penemuan makna atau ‘*illat* baru dari suatu dalil. Akan tetapi, yang perlu diperhatikan adalah keputusan untuk memilih salah satu dari berbagai makna (*ta’wil*) yang tersedia harus didasarkan pada sejauh mana hukum yang diambil sesuai dengan maqasid al-syari’ah, baik dalam ijtihad *bayani*, *ta’lili*, maupun *istislah* (Jamal, 2024).

Relevansi Dan Implementasi Prinsip Ijtihad Imam Syafi’I Dalam Transaksi Digital

Perkembangan ekonomi dan keuangan syariah di masa kini telah menghasilkan berbagai jenis transaksi dan instrumen baru yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an dan hadis. Sehingga dalam hal ini, ijtihad menjadi salah satu yang terpenting dalam mengambil suatu hukum untuk perkembangan ekonomi dan keuangan syariah yang baru. Sebagai pelopor ushul fiqh, Imam Syafi'i memberikan landasan yang teguh untuk penggunaan metode ijtihad yang sistematis, bertanggung jawab, dan berakar pada nash.

Qiyas salah satu dari metode ijtihad yang paling penting dalam pemikiran Imam Asy-Syafi'i. Karena tidak ada nash yang jelas, banyak kasus baru dalam ekonomi modern yang memerlukan analogi hukum. Ada beberapa contoh diantaranya, penggunaan uang kertas dan digital sebanding dengan emas dan perak dalam hukum riba, kedua akad murabahah atau jual beli dengan margin adalah evolusi dari jual beli biasa, ketiga sukuk atau obligasi syariah sebanding dengan ijarah atau musyarakah dan terakhir fatwa yang mengharamkan bunga bank sebanding dengan praktik riba dalam pinjaman zaman Nabi.

Dengan mempertahankan fondasi dari al-Qur'an dan sunnah, qiyas digunakan untuk memperluas cakupan hukum syariah untuk mencakup masalah kontemporer. Selama proses ijtihad dilakukan dengan cara yang sah, Imam Asy-Syafi'i memberi contoh penting bahwa hukum Islam tidak kaku, tetapi dapat berubah sesuai dengan keadaan baru. Prinsip qiyas dalam ekonomi dan keuangan syariah modern memungkinkan penyesuaian hukum terhadap Fintech dan transaksi digital, investasi syariah di pasar modal, asuransi syariah, dan model pembiayaan mikro dan crowdfunding halal. Namun, untuk

melakukannya, diperlukan perbandingan hukum dengan kasus-kasus sebelumnya dan pemeriksaan menyeluruh atas pelanggaran hukum.

Transaksi digital adalah perkembangan baru dari dunia ekonomi yang tidak ada pada zaman dahulu, termasuk di masa Imam Syafi'i. Bentuk-bentuk seperti *e-commerce*, *cryptocurrency*, *mobile banking*, QRIS, dan *fintech* menimbulkan adanya masalah fikih kontemporer, seperti akad tidak tatap muka, ketidakjelasan objek transaksi (*gharar*), dan masalah riba dan spekulasi. Secara eksplisit fiqh tidak menjelaskan tentang transaksi digital. Namun, umat Islam memiliki kerangka berpikir yang dibangun oleh ijtihad Imam Syafi'i untuk mengkaji hukum-hukum baru secara sistematis dan disiplin, dan tetap berpegang pada *nash* dan kaidah *syar'i*.

Meskipun Imam Syafi'i tidak secara eksplisit mengembangkan teori *maqasid* seperti Al-Syatibi, kemaslahatan tetap diperhatikan dalam ijtihadnya. Untuk melindungi hak kedua belah pihak, prinsip kehati-hatian dan keadilan dalam akad sangat ditekankan. Dalam fikih klasik transaksi seperti *bay' salam* (jual beli pesanan), *ijarah* (sewa), dan *wakalah* (perwakilan) dianalogikan dengan transaksi digital yang tidak memiliki dalil. Misalnya, transaksi di pasar dapat dianalogikan dengan akad *wakalah bil ujarah*. Dalam qaul jadidnya, Imam Syafi'i menunjukkan cara untuk menyesuaikan diri dengan konteks sosial Mesir, yang berbeda dari Irak. Ini menunjukkan bahwa, selama tidak bertentangan dengan *nash*, hukum dapat berubah sesuai dengan waktu dan tempat.

Fatwa-fatwa modern dan regulasi keuangan syariah di berbagai negara, termasuk Indonesia, menunjukkan pelaksanaan ijtihad Imam Syafi'i. Untuk menghasilkan fatwa tentang transaksi digital, Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) sering menggunakan metode *qiyas* dan *istinbath* yang sejalan dengan pendekatan Syafi'i, seperti fatwa DSN Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan *fintech* berbasis syariah, dan undang-undang tentang digital payment, uang elektronik, dan *e-wallet* yang menekankan kejelasan kontrak dan bebas riba. Kerangka regulasi dan metode fatwa di lembaga keuangan syariah, seperti bank syariah dan koperasi syariah, menunjukkan pelaksanaan prinsip ijtihad Imam Syafi'i untuk menuntut agar akad yang ditetapkan disesuaikan dengan prinsip *syar'i* melalui pendekatan *istinbath*.

KESIMPULAN

Konsep ijtihad dan *istinbath* hukum Imam Asy-Syafi'i sangat terorganisir dan teliti. Imam Asy-Syafi'i menekankan bahwa salah satu cara utama untuk mempelajari hukum yaitu dengan keterikatan kepada al-Qur'an, *sunnah*, dan metode *qiyas* sangat penting. Pandangan Imam Asy-Syafi'i menjadi tonggak utama dalam pembentukan *ushul fiqh* sebagai disiplin ilmu yang baku dan rasional. Selain itu, juga memberikan fondasi kuat untuk perkembangan hukum Islam hingga saat ini, termasuk dalam menjawab tantangan zaman di bidang ekonomi dan keuangan syariah.

Dalam ijtihad Imam Asy-Syafi'i, metode *qiyas* mengalami perkembangan yang signifikan. Ini menunjukkan posisi *qiyas* sebagai instrumen ijtihad yang penting dan fleksibel, namun tetap terikat oleh aturan *syariat*. Pergeseran ini terjadi selama periode Qaul Jadid, ketika pendekatan ini lebih sistematis dan terstruktur. Dengan *qiyas*, Imam

Asy-Syafi'i membangun hubungan antara Al-Qur'an dan kehidupan sehari-hari. Sehingga, hukum Islam tetap relevan dan aplikatif seiring berkembangnya zaman, termasuk dalam masalah keuangan dan ekonomi syariah kontemporer.

Meskipun lahir dari dunia klasik, prinsip ijtihad Imam Syafi'i masih sangat relevan untuk menyelesaikan masalah hukum modern, seperti transaksi digital. Melakukan penalaran hukum terhadap masalah baru didasarkan pada pendekatan Imam Syafi'i yang berlandaskan pada Al-Qur'an, hadist, ijma, qiyas, dan struktur ushul fikih yang sistematis. Prinsip kehati-hatian (*ihthyath*), kejelasan akad (*bayan al-'aqd*), dan keadilan tetap menjadi nilai utama dalam hukum syariah dalam dunia transaksi digital yang serba cepat dan kompleks. Dengan menerapkan ijtihad Imam Syafi'i, hukum yang responsif namun tetap otentik terhadap syariat dapat diciptakan, sebagaimana terlihat dari berbagai fatwa dan regulasi keuangan syariah yang berlaku saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdallah, F. (2019). Fenomena digital era revolusi industri. *Dimensi DKV Seni Rupa dan Desain*, 47–58.
- Abdullah, M. A. (2022). Evolusi fatwa fintech di Malaysia: Pendekatan masalah dalam transformasi keuangan digital. *Jurnal Ekonomi Islam Malaysia*.
- Abdussamad, Z. (2021). *Metode penelitian kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.
- Ahyar, K. (2015). Qaul Qodim wa Qaul Jadid Imam Syafi'i. *Nizham*, 4(1), 122–155.
- Al-Ghazali, I. A. (2009). *Al-Mustashfa min 'Ilmi al-Ushul*. Maktabat al-'Ashriyyah.
- Al-Suwailem, S. (2022). Penggunaan qiyas dalam cryptocurrency: Perspektif mazhab Hanbali terhadap mata uang digital. *Islamic Economic Studies*, 15(2), 45–68.
- Anwar, S., Bawazir, F., Sakina, R., & All, E. (2023). Mazhab Syafi'i sebagai paradigma dalam pemikiran dan penetapan hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Forum Penelitian Hukum dan Kemasyarakatan*, 5(2), 101–123.
- Bakar, N. A., & Rosly, S. A. (2023). Islamic finance in digital age: Framework praktis untuk implementasi keuangan syariah di era digital. *International Journal of Islamic Finance*.
- Fawwaz, A. F. (2024). Analysis of Qaul Qadim Imam Syafi'i in the social history. *Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2), 1–10.
- Fitriyah, Purwanti, E., & Nursafitri, L. (2023). *Ushul fiqh*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Hassan, M. K., & Ahmed, R. (2021). Studi komparatif metodologi ijtihad klasik dalam konteks keuangan modern: Analisis lintas mazhab. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 12(3), 112–135.
- Herdiansyah, Umar, M. H., & Ramlah. (2023). Qaul Qadim dan Qaul Jadid Asy-Syafi'i (Tinjauan sejarah dan sosiologi hukum Islam). *Jurnal Indragiri*, 3(1), 44–50.
- Jamal, A. (2024). Ijtihad dan qiyas menurut Imam Syafi'i: Hubungan qiyas dengan berbagai metode ijtihad dalam ushul fiqh. *Maqasidi*, 4(1), 1–10.
- Kamil, M. A., Muhajirin, & Malli, R. (2023). Analisis metode ijtihad hukum Imam Al-Syafi'i: Dinamika pengembangan qiyas dan implementasinya dalam Al-Sharf. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(1), 1–18.

- Kamali, M. H. (2020). Aplikasi maqasid syariah dalam fintech: Tinjauan terhadap inovasi teknologi keuangan Islam kontemporer. *Islamic Studies Review*, 8(1), 23–47.
- Kurniawan, M. R., & Nisa, F. L. (2024). Analisis inovasi dan implementasi peran ekonomi syariah. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Manajemen (JISE)*, 2(3), 127–133.
- Muh. Aqsho Che Athoriq, R., & F. P. (2023). Istinbath hukum Imam Syafi'i dalam pemecahan kasus pelecehan seksual di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Tata Negara*, 2(3), 384–397.
- Naibaho, A., Siregar, B. S., Ginting, C. N., Sinaga, G., Aulia, M. K., & Yunita, S. (2022). Memperkokoh identitas nasional pada kalangan remaja di era digital. *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, 1(3). <https://doi.org/10.58344/jmi.v1i3.82>
- Rozi, F. (2021). Pemikiran mazhab fiqh Imam Syafi'i. *HAKAM: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(2), 91–101.
- Setiawan, W. (2017a). Era digital dan tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*.
- Setiawan, W. (2017b). Era digital dan tantangannya. *Seminar Nasional Pendidikan*.
- Suryantoro, D. D. (2025). Kajian filosofis pemikiran hukum Imam Syafi'i: Pengaruhnya terhadap pembentukan mazhab fiqh dan dinamika hukum Islam. *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 6(1), 84–101.
- Susmayati, Veranty, A., Cahyani, L. U., Rambe, S. M., Jahra, S. S., & Safitri, R. (2023). Mempertahankan jati diri identitas nasional di era globalisasi dan digitalisasi. *TIPS: Jurnal Riset, Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 1(1).
- Ubaidillah. (2021). Ijtihad Imam Asy-Syafi'i: Analisis kritis terhadap Qaul Qadim dan Qaul Jadid. *Momentum: Jurnal Sosial dan Keagamaan*, 10(1), 1–28.
- Yaqin, A. (2016). Evolusi ijtihad Imam Syafi'i: Dari Qaul Qadim ke Qaul Jadid. *Al-Ahkam*, 26(2), 143–178.
- Yunita, S., Pratama, D. E., Silalahi, M. M., & Sembiring, T. (2023). Implikasi teknologi era digital terhadap transformasi pendidikan di Siderejo Hilir Kecamatan Medan Tembung Sumatera Utara. *Jurnal Darma Agung*, 31(1). <https://doi.org/10.46930/ojsuda.v31i1.3083>
- Zahrah, M. A. (1958). *Ushul fiqh*. Dar al-Fikri al-'Arabi.
- Zulkifli, A., Rahman, M. S., & Ibrahim, F. (2023). Kajian fatwa DSN-MUI tentang transaksi digital: Analisis regulasi keuangan syariah dalam ekonomi digital Indonesia. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 7(2), 78–95.